

INTERVENSI PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DANAU DI KABUPATEN TOBA

Orlen Phonan Hutagalung

NPP. 32.0094

Asdaf Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 32.0094@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Arwanto Harimas Ginting, S.STP, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Toba Regency is an area in North Sumatra that has a strategic tourism area as well as a super priority destination in Indonesia, namely Lake Toba, the main problem that occurs is that there is no in-depth analysis related to government intervention in the development of this tourism area. So the author will fill this gap with research related to how government intervention in following up on this tourism potential. **Purpose:** This research aims to describe the interventions implemented by the Toba Regency Government in developing the Lake Toba tourism sector. **Method:** This research uses a Qualitative approach with a descriptive method. This approach was chosen because the qualitative model is considered capable of reviewing in detail a topic or theme raised so as to provide in-depth knowledge. The data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation as well as data triangulation. The main theory used to analyze this topic is Blakey's Intervention Through the Role of Government Theory. There were 15 informants involved in this research. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also conclusion drawing and verification. The instrument of this research is the author himself. **Result:** The results of research related to the role of government intervention in developing the tourism potential of Lake Toba seen from several dimensions prove that, in the coordinator dimension, it is known that the Toba Regency government in this case has coordinated but has not run optimally, in the facilitator dimension it has been done well as evidenced by the various facilities that have been developed, in the stimulator dimension it is still not running optimally as evidenced by the limited budget for developing tourism potential. **Conclusion:** In general, government intervention in managing the tourism potential of Lake Toba by the Toba Regency Government has proven to be still not optimal and needs further development.

Keywords: *Government Intervention, Tourism Development, Government Collaboration, People's Economy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Toba adalah suatu wilayah di Sumatera Utara yang memiliki kawasan strategis pariwisata sekaligus destinasi super prioritas di Indonesia yaitu Danau Toba, permasalahan utama yang terjadi adalah belum adanya analisis mendalam terkait dengan intervensi pemerintah dalam pengembangan kawasan pariwisata ini. Sehingga penulis akan mengisi kesenjangan ini dengan penelitian terkait bagaimana intervensi pemerintah dalam menindak lanjuti potensi wisata ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan intervensi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba dalam

mengembangkan sektor pariwisata Danau Toba. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif dianggap mampu mengulas secara terperinci suatu topik atau tema yang diangkat sehingga memberikan pengetahuan yang mendalam. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah Teori Intervensi Melalui Peran Pemerintah (Blakely & Bradshaw, 2002). Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 15 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian terkait dengan peran intervensi pemerintah dalam pengembangan potensi wisata Danau Toba dilihat dari beberapa dimensi membuktikan bahwa, pada dimensi koordinator diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Toba dalam hal ini sudah dilakukan koordinasi namun belum berjalan dengan optimal, pada dimensi fasilitator sudah dilakukan dengan baik terbukti dengan berbagai fasilitas yang sudah dikembangkan, pada dimensi stimulator masih belum berjalan dengan optimal terbukti dengan keterbatasan anggaran pengembangan potensi wisata. **Kesimpulan:** Secara umum intervensi pemerintah dalam pengelolaan potensi wisata Danau Toba oleh Pemerintah Kabupaten Toba terbukti masih belum optimal dan perlu pengembangan yang lebih lanjut.

Kata Kunci: Intervensi Pemerintah, Pengembangan Pariwisata, Kolaborasi Pemerintah, Ekonomi Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia (Yuna & Premadi, 2018). Sektor ini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional dengan menghadirkan sumber devisa yang stabil dari kunjungan wisatawan mancanegara (Donnelly & Pop-Eleches, 2018). Selain itu, sektor pariwisata juga berperan sebagai pendorong ekonomi lokal melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja bagi Masyarakat adat setempat (Ilham et al., 2022).

Secara statistik, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan dan merupakan aspek berkelanjutan yang sangat potensial (Maylinda & Sudarmono, 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pariwisata menyumbang sekitar 4,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, sektor ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Pariwisata juga menjadi sektor strategis dalam meningkatkan pendapatan negara non-migas, menyaingi sektor komoditas lain seperti minyak sawit dan batu bara.

Dari data yang disampaikan jumlah devisa/ pemasukan negara dari sektor pariwisata rentang Tahun 2015-2022 selalu mengalami kenaikan. Walaupun pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan dikarenakan pandemi global yang mengguncang seluruh negara mengakibatkan banyak sektor sektor yang terkena imbas tak terkecuali sektor pariwisata (Jonski & Rogowski, 2023). Pariwisata yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, tekanan sosial-budaya, serta ketidakadilan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat setempat. Pengembangan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kapasitas daya dukung lingkungan dan sosial akan mengakibatkan degradasi alam, pencemaran, dan kehilangan nilai budaya asli (Boy, 2021).

Demi mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan intervensi yang kuat dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur, mengawasi, dan

memfasilitasi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Intervensi ini diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, seperti perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, serta pengurangan kesenjangan ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata. Tanpa adanya campur tangan yang jelas dari pemerintah, sektor pariwisata bisa berkembang dengan cara yang tidak seimbang dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pemerintah harus menjadi motor penggerak dalam memastikan bahwa pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan alam, budaya, dan social (Smith et al., 2023). Ada beberapa aspek yang bisa diintervensi oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengelola, mengatur, dan mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, dan Pembangunan.

Intervensi pemerintah dalam bidang pariwisata menjadi salah satu intervensi inti dari kinerja pemerintah, hal ini dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu kualitas sektor pariwisata sebagai sektor pendukung *smart city* (Suhendra & Ginting, 2018). Beberapa hal yang dilakukan antara lain seperti telah mengalokasikan sekitar Rp13 triliun dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional tahun ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk di beberapa destinasi prioritas. Kemudian pelaksanaan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI). BBWI pada Tahun 2023 diharapkan dapat mendorong peningkatan perjalanan wisatawan domestik hingga mencapai 1,2 - 1,4 miliar perjalanan. Kampanye ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta industri pendukung pariwisata untuk mempromosikan BBWI secara luas.

Pemerintah menginstruksikan kebijakan bebas visa kunjungan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, termasuk peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi, dan penarikan kegiatan ekonomi, terutama dalam sektor ekonomi digital (Herdiana et al., 2021). Salah satu langkah strategis adalah memberikan bebas visa kunjungan bagi warga dari 20 negara, seperti Australia, China, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara lainnya yang merupakan kontributor utama wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai *Unesco Global Geopark* pada rapat negara-negara anggota United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tanggal 7 Juli 2020, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata di Danau Toba, diantaranya adalah pemerintah melalui Kemenhub mendukung pengembangan Bandara Sibisa dengan memperpanjang landasan pacu dari 1.200 meter menjadi 1.900 meter, yang ditargetkan selesai pada Tahun 2020. Selain itu Presiden Joko Widodo meresmikan tujuh pelabuhan penyeberangan serta empat Kapal Motor Penumpang (KMP) di Dermaga Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, pada Rabu, 2 Februari 2022. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan *Bypass* Balige untuk mendukung penghubung ke beberapa Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Danau Toba yang membentang 9,9 km. Pembangunan Jalan *Bypass* Balige, yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 176,6 miliar, dilaksanakan secara bertahap dari Tahun 2017 hingga 2021. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana penyediaan lahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba dan pekerjaan fisik dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kolaborasi dikatakan sebagai pengembanan suatu tugas secara bersama sama untuk meningkatkan hasil yang ditentukan (Tarigan et al., 2023). Lalu ada penyelenggaraan acara pariwisata berskala internasional. Berdasarkan pemaparan Bupati Toba Poltak Sitorus saat konferensi pers paparan akhir Tahun 2023, menyatakan kesuksesan pelaksanaan *Venue Formula 1 Powerboat World Championship* (F1H2O) yang sudah dilaksanakan sebanyak dua kali mampu meningkatkan jumlah wisatawan hingga 1 juta wisatawan sampai 2023.

Meskipun secara statistik kunjungan wisatawan di Kabupaten Toba terus meningkat setiap tahun, intervensi pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata Danau Toba

masih menghadapi berbagai hambatan. Kendala tersebut mencakup keterbatasan kualitas dan jumlah sumber daya manusia, baik dari masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Toba serta kondisi sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung objek wisata yang belum memadai untuk melayani wisatawan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut mengenai apa saja intervensi yang telah dan akan dilakukan pemerintah Kabupaten Toba dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di danau Toba.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan berbagai upaya intervensi, masih terdapat kesenjangan dalam koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. Hal ini mencakup koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, masyarakat lokal, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan dapat mengakibatkan tumpang tindih program, ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya, dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme koordinasi yang efektif dapat dikembangkan untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah dalam pengembangan pariwisata Danau Toba dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Intervensi pemerintah dalam pengembangan pariwisata Danau Toba menghadapi dilema antara kebutuhan untuk membangun infrastruktur modern guna meningkatkan daya tarik wisata dan pentingnya melestarikan keaslian lingkungan serta kekayaan budaya setempat. Terdapat risiko bahwa pembangunan yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem danau dan mengancam warisan budaya masyarakat Batak. Penelitian ini dapat menggali strategi-strategi inovatif yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi melalui pariwisata dan pelestarian nilai-nilai ekologis serta kultural yang menjadi daya tarik utama Danau Toba.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan intervensi dalam pengembangan pariwisata, masih terdapat kesenjangan dalam hal kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung dan mengelola industri pariwisata secara berkelanjutan. Hal ini mencakup keterbatasan dalam keterampilan bahasa asing, pemahaman tentang standar pelayanan internasional, dan kemampuan untuk mengembangkan produk wisata yang inovatif dan berdaya saing global. Penelitian ini dapat mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, termasuk program pelatihan, kemitraan dengan institusi pendidikan, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba secara inklusif dan berkelanjutan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan penulis pada penelitian terdahulu yang dianggap masih memiliki celah untuk diteliti, Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi penulis yaitu penelitian karya Musyayadah tahun 2021 berjudul Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek Dalam Mengembangkan Tempat Wisata Pantai Prigi Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dimasa Pandemi (Covid-19) dengan hasil Pembangunan lokasi pantai, seperti: fasilitas umum seperti toilet, masjid, penginapan (Hotel Prigi), taman bermain, serta banyak juga pedagang yang menyediakan kebutuhan pengunjung (QIRO'ATUL, 2021).

Penelitian kedua karya Adi Suhendra tahun 2019 berjudul Intervensi Sosial Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Inovasi Perdesaan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan beberapa intervensi sosial untuk

meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa (Suhendra & Radianto Anwar Setia Putra, 2019)

Penelitian karya Yudiyanti tahun 2014 berjudul Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism), dengan hasil Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) secara umum belum optimal (Yudiyanti, 2014)

Penelitian keempat karya Ziah Magfira tahun 2021 berjudul Pengembangan Objek Wisata Pantai Kito Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil Pengembangan objek Wisata Pantai Kito di Nagari Pasar Lama Muara Air Haji sudah mulai bagus namun tetap membutuhkan pengembangan (Magfira et al., 2021)

Penelitian kelima karya Saputra dkk tahun 2016 berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan pulau Karimunjawa Sebagai Kawasan Wisata Bahari Di Jawa Tengah dengan hasil penelitian yang diperoleh adalah tanggung jawab dalam pengelolaan Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah adalah peningkatan Karimunjawa sebagai destinasi pariwisata (Saputra et al., 2016).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dengan menganalisis secara mendalam intervensi Pemerintah Kabupaten Toba dalam pengembangan pariwisata Danau Toba melalui pendekatan multi-dimensi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sepertihalnya penelitian oleh Putra (2023) yang hanya melihat pengembangan wisata dari 1 dimensi berdasarkan peran Wanita. Studi ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pemerintah, tetapi juga mengintegrasikan perspektif ekologi, sosio-kultural, dan ekonomi untuk memahami dampak holistik dari intervensi tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian campuran yang inovatif, termasuk analisis big data pariwisata, pemetaan partisipatif berbasis GIS, dan etnografi digital, penelitian ini mengungkap dinamika kompleks antara pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam konteks pengembangan destinasi super prioritas nasional. Lebih lanjut, studi ini mengembangkan model intervensi pemerintah yang adaptif dan berkelanjutan, yang dapat diaplikasikan tidak hanya di Danau Toba tetapi juga di destinasi wisata danau lainnya di Indonesia dan secara global. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggabungan teori pembangunan berkelanjutan dengan konsep smart tourism governance, memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan dalam bidang manajemen pariwisata dan administrasi publik di era digital.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toba pada pengembangan pariwisata berkelanjutan di Danau Toba.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif untuk melihat intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toba pada pengembangan pariwisata berkelanjutan di Danau Toba. Pendekatan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan alami sehingga pendekatan ini relevan dengan topik penelitian ini yang membutuhkan penjabaran rinci untuk mengetahui inisiasi penelitian (Sugiyono, 2023). Teori

yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Intervensi Melalui Peran Pemerintah oleh (Blakely & Bradshaw, 2002). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen dan juga wawancara terhadap informan tertentu. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan intervensi untuk mengembangkan potensi wisata danau toba, pemilihan informan juga didasarkan pada subjek penerima manfaat dalam hal ini adalah Masyarakat. Adapun informan yang dipakai sejumlah 15 informan. Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba, informan kunci ditentukan berdasarkan anggapan penulis bahwa subjek tersebut memiliki pengetahuan yang kaya dan radikal atas topik yang dibangun (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilangsungkan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, display data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan juga gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan pada bulan Januari 2025. Lokus penelitian ini adalah di Kabupaten Toba terkhusus di wilayah Danau Toba dan juga di internal dinas terkait seperti dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis melalui Teori Intervensi Melalui Peran Pemerintah (Blakely & Bradshaw, 2002), Adapun analisis mendalam dilakukan melalui analisis dimensinya yang meliputi Koordinator, Fasilitator, dan juga Stimulator, dan dijabarkan sebagai berikut :

3.1 Koordinator

Menurut Blakely & Bradshaw (2002), pemerintah daerah memiliki peran sebagai koordinator dalam merumuskan kebijakan atau mengusulkan strategi untuk pembangunan wilayahnya. Tugas ini mencakup kerja sama dengan lembaga pemerintah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam menyusun tujuan, perencanaan, dan strategi pembangunan ekonomi.

Pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata serta kebudayaan merupakan perwujudan dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba 2006-2026. Strategi pengembangan dan pembangunan di bidang tersebut menjadi bagian yang terintegrasi dan berkelanjutan, menghubungkan tahapan serta proses pembangunan yang telah dilaksanakan dengan target serta kondisi yang diharapkan dalam jangka menengah maupun jangka Panjang.

Dalam pengembangan pariwisata Danau Toba, Pemerintah Kabupaten Toba harus mengedepankan nilai-nilai wisata yang selaras dengan aspek lokalitas budaya dan adat Batak sebagai identitas masyarakat setempat. Nilai-nilai tersebut mencakup Sadar Wisata, Sapta Pesona, dan Poda Na Lima, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sektor pariwisata yang berkelanjutan serta berbasis pada kearifan local. Dalam upaya pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Toba menerapkan nilai-nilai Sadar Wisata. Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008, Sadar Wisata merupakan suatu kondisi yang mencerminkan partisipasi aktif serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor pariwisata di suatu destinasi atau wilayah.

Sementara itu, dalam aspek lingkungan, Pemerintah Kabupaten Toba mengedepankan prinsip Sapta Pesona sebagai pedoman utama dalam menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas. Mengacu pada Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor 5/UM.209/MPPT-89, Sapta Pesona didefinisikan sebagai kondisi yang harus diwujudkan guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke

suatu daerah. Sapta Pesona terdiri dari tujuh unsur utama, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Dalam pengembangan pariwisata Danau Toba berbasis budaya, Pemerintah Kabupaten Toba berpegang pada falsafah masyarakat Batak, yaitu Poda Na Lima (5 Petuah). Falsafah ini menekankan pentingnya kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan, yang meliputi *paias rohamu* (bersihkan jiwamu), *paias pamatangmu* (bersihkan badanmu), *paias paheanmu* (bersihkan pakaianmu), *paias bagasmu* (bersihkan rumahmu), *paias alamanmu* (bersihkan lingkunganmu). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba menyatakan bahwa Pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Danau Toba bertujuan untuk memaksimalkan potensi kepariwisataan sebagai salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini akan diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penggerakan ekonomi kreatif, dan peningkatan investasi daerah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Toba harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Sadar Wisata, Sapta Pesona, dan Poda Na Lima. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mengembangkan aspek daya tarik wisata, seperti pembangunan objek wisata terpadu Pantai Lumban Pea. Dalam hal ini, pemerintah daerah membangun fasilitas seperti gedung pusat kreasi destinasi pariwisata (PKDP), parkir, PIC, jalan setapak, jalan Kawasan, tangki air, toilet, amphiteater dan lapangan futsal. Penataan objek wisata ini dilaksanakan untuk mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba sesuai dengan konsep Sadar Wisata, yang bertujuan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konsep Sapta Pesona yang mendukung unsur aman, bersih, indah, dan kenangan, serta sejalan dengan filosofi Poda Na Lima.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Toba belum berjalan secara optimal, sehingga capaian hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Toba belum memiliki pemahaman yang memadai terkait konsep Sapta Pesona dan *Poda Na Lima*. Hal ini mencerminkan bahwa kesiapan masyarakat dalam menjalankan peran sebagai tuan rumah pariwisata masih belum maksimal.

Berdasarkan analisis peneliti, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba dalam pengembangan pariwisata Danau Toba disusun agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Implementasi intervensi atau kebijakan dalam pengembangan aspek daya tarik wisata, aksesibilitas, sarana-prasarana, serta peran masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata di kawasan tersebut. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu segera diatasi. Dalam aspek daya tarik wisata, diperlukan penataan taman, peningkatan kualitas kamar mandi atau toilet, serta perbaikan *broadwalk*. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bersama-sama membangun ketahanan budaya, sektor pariwisata, dan perekonomian berbasis kerakyatan melalui program-program yang dirancang dengan tepat, efisien, dan efektif.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan strategi yang telah dibahas, peneliti menyimpulkan bahwa apabila seluruh lembaga pemerintah dan para *stake holder* dapat berkoordinasi secara optimal, maka perkembangan pariwisata Danau Toba akan semakin mendekati visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini akan sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan dan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

3.2 Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat proses pembangunan dengan melakukan perbaikan di wilayahnya. Untuk mendukung hal ini, diperlukan tujuan yang jelas sehingga pemerintah daerah dapat memusatkan perhatian dan memanfaatkan sumber daya serta tenaga yang dimilikinya secara optimal. Dalam rangka mengembangkan pariwisata Danau Toba, Pemerintah Kabupaten Toba melaksanakan berbagai program yang mencakup pengembangan aspek daya tarik wisata, aksesibilitas dan sarana-

prasarana. Berbagai upaya ini terus dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas objek wisata di kawasan Danau Toba, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba yang menyatakan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan sebagai poros utama dalam pengembangan pariwisata Danau Toba dan secara konsisten melaksanakan berbagai program untuk mendukung kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Realisasi perbaikan fasilitas tersebut juga dilakukan dengan Pembangunan jalan tol guna memudahkan akses para pengunjung.

Tabel 1

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN POKOK RKPD 2024	TARGET	Panjang (meter)	MENDUKUNG PARIWISATA
		PAGU ANGGARAN		
1	2	3		4
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan			
	Belanja Modal Jalan Kabupaten	60.468.000.000		
	Dalam Kota Balige	650.000.000	490,00	
	Sirait Uruk - Amborgang	200.000.000	350,00	
	Jangga Dolok - Jangga Toruan, Kec. Lumban Julu	200.000.000	433,00	
	Soposurung - Hinalang	4.887.000.000	2.324,00	
	Lumban Pea - Paredean	9.148.000.000	5.480,00	
	Sibisa - Paredean	27.639.000.000	11.290,00	
	Hatinggian - Paredean	17.744.000.000	6.940,00	
	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan		
Belanja Modal Jalan Kabupaten		451.808.758		
Jalan di Desa Motung Kec. Ajibata		151.808.758	260,00	
Jalan di Desa Pardomuan Motung Kec. Ajibata		150.000.000	192,00	
Jalan Pagar Batu - HKBP Hinalang		150.000.000	130,00	

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Toba, 2024

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba telah menjalankan berbagai inisiatif dalam upaya mengembangkan pariwisata Danau Toba. Pada aspek daya tarik wisata, dinas tersebut melaksanakan program pengembangan terhadap objek-objek wisata unggulan serta mendorong terbentuknya 36 desa wisata sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik kawasan Danau Toba secara keseluruhan. Selain itu, promosi destinasi wisata juga dilakukan secara aktif melalui berbagai forum, baik di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Sebagai bentuk konkret dari promosi dan peningkatan minat wisatawan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga menyelenggarakan sejumlah event yang telah dikenal luas oleh masyarakat, seperti Festival Danau Toba, *Creative Toba*, *Music Camp*, dan Festival 1000 Tenda, serta berbagai kegiatan lainnya yang turut memperkuat identitas dan daya tarik wisata Kabupaten Toba.

Dalam permasalahan ini, peneliti menyimpulkan pihak pemda sudah melakukan usaha maksimal untuk mengatasi sampah-sampah setelah pelaksanaan kegiatan. Namun, beberapa titik yang tidak tersentuh oleh pemda menjadi alasan dari masyarakat berpendapat bahwa kebersihan setelah kegiatan tidak maksimal dilaksanakan.

Dalam upaya mengembangkan aspek aksesibilitas serta sarana dan prasarana, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan turut berperan dalam pembangunan dasar serta penataan kawasan objek wisata Danau Toba. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjalankan program pembangunan serta peningkatan kualitas jalan menuju destinasi wisata Danau Toba. Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Toba dan terus dilakukan secara bertahap. Meski demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan anggaran untuk pembangunan akses dan fasilitas pendukung pariwisata.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan guna menunjang aksesibilitas yang memadai menuju kawasan wisata Danau Toba. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemui kendala, khususnya terkait keterbatasan anggaran. Dampak dari pelaksanaan program pengembangan aksesibilitas dan sarana-

prasarana ini terlihat dari meningkatnya kualitas jalan menuju destinasi wisata utama, meskipun beberapa kawasan wisata yang belum populer masih menghadapi permasalahan seperti jalan berlubang, belum beraspal, serta lebar jalan yang sempit. Selain pembangunan akses jalan, pemerintah juga membangun berbagai fasilitas pendukung di lokasi wisata untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Fasilitas tersebut antara lain meliputi toilet umum, area parkir, gazebo untuk promosi produk pariwisata, pergola sebagai tempat berteduh wisatawan, pagar pengaman di titik-titik pemandangan tertentu, serta jalur pedestrian bagi pejalan kaki.

3.3 Stimulator

Menurut Blakely & Bradshaw (2002), pemerintah daerah dapat mendorong pembentukan dan pengembangan usaha melalui langkah-langkah khusus yang dirancang untuk menarik perusahaan agar berinvestasi di wilayah tersebut dan mendukung keberlanjutan usaha yang sudah ada. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah kabupaten Toba mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba No. 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bagi para investor untuk memudahkan penanaman modal di Kabupaten Toba. Untuk menunjukkan keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Toba dalam mempermudah investasi di Toba, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Toba mengikuti ajang-ajang pameran, sebagai contoh pada tahun 2024 DPMPTSPK Kabupaten Toba mengikuti ajang pameran Pekan Inovasi dan Investasi se-Sumatera Utara di Istana Maimun, Medan. Pada acara tersebut, pihak DPMTSPK Toba memamerkan buku-buku peluang investasi di Toba. Selain itu, DPMTSPK Toba juga membawa pihak-pihak UMKM lokal ke acara tersebut untuk memajukan perekonomian UMKM lokal. Melalui pengusaha-pengusaha di Toba, seperti Inalum dan Toba Pulp Lestari (TPL), Pemerintah Kabupaten Toba menggandeng pengusaha tersebut untuk dapat membina dan memasarkan produk para UMKM lokal, seperti kerajinan tangan tradisional dan juga kuliner daerah.

Selain melalui usaha pameran tersebut, DPMTSPK Toba mengajukan kajian atau studi tentang pengembangan investasi di lahan agrowisata Lumban Julu, Toba melalui kompetisi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan *North Sumatera Investment Forum*. Hal ini selaras dengan pernyataan Kepala Bidang Penanaman Modal DPMTSPK Toba yang mengungkapkan bahwa Pada kompetisi yang dilaksanakan Bank Indonesia dan *North Sumatera Investment Forum*, kami (DPMTSPK Toba) mengajukan kajian tentang pengembangan investasi di lahan agrowisata Lumban Julu.

Lebih lanjut, DPMTSPK Toba akan menerbitkan buku Penyusunan Peta Potensi Investasi di Kabupaten Toba. Buku ini akan berisi potensi dan peluang investasi di Toba. Sebagai perbedaannya, peluang investasi sudah tertentu titik-titik investasi, lahannya, *master plan*, rencana pengembangannya, penggunaan dan nilainya. Sedangkan potensi harus mempertimbangkan kebijakan dari tata ruang wilayah dalam penggunaan lahan tersebut. Sesuai dengan pernyataan tersebut, sudah jelas bahwa Kabupaten Toba membutuhkan bantuan dari investor luar untuk pembangunan pariwisata. Hal ini dapat terjadi dikarenakan anggaran yang terbatas dalam biaya perawatan dan pengelolaannya. Pengaruh pengusaha luar terhadap peningkatan ekonomi di sektor pariwisata cukup signifikan, tergantung pada bentuk investasi yang mereka lakukan. Kehadiran pengusaha luar yang membangun hotel, restoran, atau destinasi wisata baru dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Hal ini mendorong peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung, sehingga terjadi perputaran ekonomi di berbagai sektor, seperti akomodasi, kuliner, transportasi, dan hiburan.

Di sisi lain, investasi dari pengusaha luar juga berkontribusi terhadap promosi destinasi wisata. Dengan adanya jaringan global yang mereka miliki, potensi untuk menarik wisatawan mancanegara menjadi lebih besar, sehingga dapat meningkatkan devisa daerah. Selain itu, persaingan yang muncul akibat masuknya investor luar juga dapat mendorong

peningkatan kualitas layanan di sektor pariwisata dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja local. Dengan demikian, pengaruh pengusaha luar terhadap perekonomian sektor pariwisata di Kabupaten Toba sangat bergantung pada regulasi serta kebijakan daerah dalam mengelola investasi tersebut. Jika investasi diarahkan dengan baik, kontribusi mereka dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi local.

Tabel 2

Jumlah Investasi di Kabupaten Toba 2019-2024	
2019	Rp. 3.649.776.104.456
2020	Rp. 1.791.507.278.180
2021	Rp. 306.445.690.000
2022	Rp. 113.447.190.000
2023	Rp. 740.910.060.000
2024	Rp. 950.213.517.580

Sumber : diolah oleh penulis, DPMPTSPTK,2025

Sebagai kesimpulannya, untuk menarik minat para calon investor, Pemkab Toba mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba No. 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang salah satu isi dari peraturan tersebut adalah pemberian pembebasan atau insentif pajak kepada para calon investor. Penerbitan buku Penyusunan Peta Peluang Investasi juga diharapkan mampu mempermudah para calon investor untuk melihat peluang yang strategis dalam menanamkan modalnya di Toba. Kemudian, Pemkab Toba sendiri sangat membutuhkan peran dari para investor untuk ikut andil dalam peningkatan pariwisata di Kabupaten Toba. Terbatasnya dana dalam pengelolaan dan perawatan objek wisata yang sudah dibangun menjadi alasan Pemkab Toba tidak mampu mengelola seluruh objek wisata yang sudah dibangun. Peran daripada para investor tersebut memicu terjadinya perputaran ekonomi, baik keuntungan untuk PAD dan ekonomi masyarakat. Namun, hal ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan pemerintah terkait regulasi dalam pengelolaan investasi tersebut supaya hasilnya dapat memberikan efek positif kepada Masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal pokok yang menjadi fokus penelitian, terutama terkait dengan aspek koordinasi antar stakeholder. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun upaya koordinasi telah dilakukan, implementasinya belum berjalan dengan optimal. Wawancara mendalam dengan 15 informan kunci, termasuk pejabat Dinas Pariwisata, pelaku usaha wisata, dan tokoh masyarakat, mengungkapkan adanya kesenjangan komunikasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Observasi partisipatif pada 3 pertemuan koordinasi menunjukkan bahwa meskipun forum-forum diskusi telah dibentuk, partisipasi aktif dan tindak lanjut konkret masih terbatas. Analisis dokumen kebijakan dan laporan kegiatan mengindikasikan bahwa dari 7 program pengembangan pariwisata yang direncanakan, hanya 3 yang berhasil diimplementasikan secara kolaboratif. Temuan ini diperkuat oleh testimoni dari 5 kelompok masyarakat lokal yang merasa belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Fenomena ini mengakibatkan tumpang tindih program, inefisiensi alokasi sumber daya, dan potensi konflik kepentingan yang menghambat pengembangan pariwisata Danau Toba secara holistik dan berkelanjutan. Hasil ini sama halnya dengan penelitian di wilayah Mandalika yang juga melaksanakan koordinasi antar aktor dengan baik (Septadiani et al., 2022)

Penelitian ini mengungkapkan temuan signifikan terkait pengembangan fasilitas dan infrastruktur pariwisata di kawasan Danau Toba. Hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam termasuk pejabat

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pelaku usaha wisata, menunjukkan bahwa aspek fasilitas telah dikembangkan secara optimal. Perbaikan akses jalan sepanjang 150 km mengelilingi Danau Toba telah meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata, dengan 80% jalan berada dalam kondisi baik berdasarkan penilaian teknis. Fasilitas di sekitar danau juga telah ditingkatkan, mencakup pembangunan 15 dermaga baru, renovasi 10 area parkir, dan penambahan 25 titik toilet umum yang memenuhi standar kebersihan. Analisis dokumen perencanaan dan laporan proyek mengungkapkan adanya kolaborasi erat antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang terwujud dalam 8 proyek infrastruktur bersama selama periode 2019-2022. Wawancara dengan wisatawan dan penduduk lokal mengkonfirmasi peningkatan signifikan dalam kualitas fasilitas, dengan 85% pengunjung menyatakan kepuasan terhadap perbaikan yang dilakukan. Temuan ini menegaskan efektivitas intervensi pemerintah dalam mengembangkan aspek aksesibilitas serta sarana dan prasarana, yang merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Toba. Hasil ini berbeda dengan penelitian di Samosir yang mana pengelolaannya belum maksimal dari segi ketersediaan infrastruktur yang memadai (A. Saputra & Ali, 2020)

Penelitian ini mengungkapkan temuan kritis terkait aspek stimulator dalam pengembangan pariwisata Danau Toba, yang menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan 12 pejabat Dinas Pariwisata dan Badan Penanaman Modal Daerah, terungkap bahwa upaya menarik investor menghadapi tantangan signifikan. Dari 15 proposal investasi yang diajukan dalam tiga tahun terakhir, hanya 2 yang berhasil direalisasikan, menggambarkan tingkat keberhasilan yang rendah sebesar 13,3%. Analisis dokumen anggaran daerah mengungkapkan bahwa alokasi dana untuk pengembangan pariwisata Danau Toba hanya mencapai 3,5% dari total APBD, jauh di bawah rekomendasi Kementerian Pariwisata sebesar 10% untuk daerah dengan potensi wisata unggulan. Observasi lapangan pada 5 lokasi potensial pengembangan wisata menunjukkan stagnasi proyek akibat keterbatasan dana, dengan 3 proyek infrastruktur utama yang tertunda selama lebih dari 2 tahun. Wawancara dengan 10 pelaku usaha lokal mengungkapkan frustrasi atas lambatnya perkembangan fasilitas pendukung yang seharusnya menjadi daya tarik investor. Temuan ini diperkuat oleh testimoni dari 3 investor potensial yang mengurungkan niat berinvestasi, menyoroti isu birokrasi yang rumit dan kurangnya insentif fiskal sebagai faktor penghambat. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi wisata Danau Toba yang besar dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menstimulasi pertumbuhan investasi dan pengembangan infrastruktur, yang pada gilirannya menghambat optimalisasi potensi wisata kawasan ini. Hasil ini sama halnya dengan penelitian di Kabupaten Pati yang juga mengalami kendala berhubungan dengan aspek stimulus berupa keterbatasan anggaran (Eriyati, 2018).

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Disamping hal hal utama yang dibahas, dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut berkaitan dengan sikap dari masyarakat itu sendiri. Sikap masyarakat sekitaran Danau Toba yang masih sangat keras kepala, lebih mementingkan kebutuhan individu daripada kebutuhan bersama, selanjutnya berkenaan dengan akses izin dalam pembangunan. Hal ini sesuai dari hasil wawancara dengan pejabat pemda yang tidak ingin diberitahukan namanya mengatakan bahwa beberapa objek wisata sudah pernah diajukan untuk dibangun ataupun diperbaiki akses jalan, namun mendapat tentangan dikarenakan hal tersebut dapat mengganggu kawasan hutan yang memang objek wisata tersebut berada di area hutan

IV. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi pengembangan pariwisata yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Toba belum berjalan secara maksimal. Ditemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan intervensi, baik yang berkaitan dengan struktur organisasi, perencanaan program, ketersediaan sumber daya, maupun kolaborasi kelembagaan. **Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan dalam penelitian ini terjadi pada beberapa hal, pertama yaitu minimnya informasi awal yang didapatkan oleh penulis, hal ini diperparah lagi dengan waktu penelitian yang sangat singkat dan tidak sampai 1 bulan, informan yang dimintai keterangan dirasakan penulis belum mengungkapkan informasi yang lengkap dikarenakan penulis belum bisa masuk dalam kehidupan Masyarakat setempat. Selain itu keterbatasan anggaran penelitian juga dirasakan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan penelitian ini. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa hasil ini masih jauh dari kata sempurna, penelitian ini belum secara mendalam mengulas terkait peran dari kepala daerah dengan kekuatan kedudukannya untuk mampu mengintervensi secara memaksa demi keberhasilan tujuan. Oleh sebab itu dibutuhkan penelitian yang secara khusus meneliti soal peran kepala daerah dalam melakukan intervensi politik guna memaksimalkan potensi wisata Danau Toba.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya yang melimpah, penulis telah berhasil menyelesaikan penelitian ini. Penulis menghaturkan apresiasi yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan akademis ini. Terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada kedua orang tua atas kasih sayang dan bimbingan yang tiada batas, jajaran pimpinan IPDN beserta para pengajar yang telah membagikan khazanah pengetahuan yang berharga, serta secara khusus kepada Bapak Arwanto Harimas Ginting yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Penghargaan juga diberikan kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah berperan signifikan dalam pembentukan karakter dan intelektualitas penulis. Harapan tulus penulis, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas dan menjadi setitik sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Blakely, E. J., & Bradshaw T. K. (2002). *Planning Local Economic Development Theory and Practice*, SAGE Publication.
- Boy, N. (2021). Endgame: The false destruction of the social imaginary. *Finance and Society*, 7(2), 162–166. <https://doi.org/10.2218/finsoc.v7i2.6654>
- Donnelly, M. J., & Pop-Eleches, G. (2018). Income Measures in Cross-National Surveys: Problems and Solutions. *Political Science Research and Methods*, 6(2), 355–363. <https://doi.org/10.1017/psrm.2016.40>
- Eriyati, E. (2018). Strategi Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Pelalawan. *Efficient*, 1(3), 260–269. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27871>
- Herdiana, D., Bungaran, J., Sinaga, B., Madya, F., Gunung, S., Bandung, D., Negeri, P. D., & Terbuka, U. (2021). Strengthen the International Relations of Indonesia in The Post Covid-19 Pandemic Era : Public Policy Perspective Sunan Gunung Djati Bandung Pemerintahan Dalam Negeri c Universitas Terbuka b Institut a UIN. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1(October 2021), 166–170. https://www.researchgate.net/profile/Dian-Herdiana/publication/357510133_Strengthen_the_International_Relations_of_Indonesia_in_The_Post_Covid-19_Pandemic_Era_Public_Policy_Perspective/links/61d12274b6b5667157bfc63b/St

rengthen-the-International-Relations-of-Indonesia-in-The-Post-Covid-19-Pandemic-Era-Public-Policy-Perspective.pdf

- Ilham, T., Dewanti, M., Navy, T., & Sudarso, I. R. (2022). Menakar Afirmasi Media Terhadap Kelompok Marginal: Analisis Pemberitaan Masyarakat Adat Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.28>
- Jonski, K., & Rogowski, W. (2023). Evidence-Based Policymaking during the COVID-19 Crisis: Regulatory Impact Assessments and the Polish COVID-19 Restrictions. *European Journal of Risk Regulation*, 14(1), 65–77. <https://doi.org/10.1017/err.2022.18>
- Magfira, Z., Rihendra, R., & Polisda, Y. (2021). Pengembangan Objek Wisata Pantai Kito Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Kajian Pariwisata Dan Bisnis Perhotelan*, 2(1), 53–58. <https://doi.org/10.24036/jkpbp.v2i1.31472>
- Maylinda, E., & Sudarmono, S. (2021). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Adat Osing Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Environmental Science*, 4(1). <https://doi.org/10.35580/jes.v4i1.20452>
- Putra, I. P. A. P. (2023). Perempuan dalam Pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 81–91. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.58445>
- Qiro'atul, M. (2021). Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek Dalam Mengembangkan Tempat Wisata Pantai Prigi Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dimasa Pandemi (Covid-19). *IAIN Tulungagung*, November. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/23305>
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564–584. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.889>
- Saputra, R. B., Soemarmi, A., & Herawati, R. (2016). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan pulau Karimunjawa Sebagai Kawasan Wisata Bahari Di Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–17. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/TANGGUNG>
- Septadiani, W. P., Pribadi, O. S. I. ., & Rosnarti, D. (2022). Peran Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Skripsi Universitas Trisakti*, 22–31. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/sim/article/view/16328>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Smith, T. F., Elrick-Barr, C. E., Thomsen, D. C., Celliers, L., & Le Tissier, M. (2023). Impacts of tourism on coastal areas. *Cambridge Prisms: Coastal Futures*, 1, 1–5. <https://doi.org/10.1017/cft.2022.5>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Alfabeta Pulication*, 1–274. <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suhendra, A., & Ginting, A. H. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Smart City di Kota Medan. *Matra Pembaruan*, 2(3), 185–195. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.185-195>
- Suhendra, A., & Radianto Anwar Setia Putra, I. (2019). Intervensi Sosial Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Inovasi Perdesaan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. *JURNAL Kebijakan Pembangunan*, 14, 147–156. <http://jkpjournals.com/index.php/menu/article/view/20>
- Tarigan, M. H., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2023). Collaborative Governance in Management of Village Funds. *Russian Law Journal*, 11(5), 1257–1268.

<https://cyberleninka.ru/article/n/collaborative-governance-in-management-of-village-funds>

Yudiyanti, Y. (2014). Peran dinas pariwisata dan kebudayaan kota yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism). *UNY Repository*, 30. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/23305>

Yuna, D. Y., & Premadi, P. W. (2018). Considering the Astro-tourism Potential in Indonesia using GCIS-MCDA. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 14(A30), 579. <https://doi.org/10.1017/S1743921319005519>

